

ANALISA PENGARUH EKONOMI KERAKYATAN SESUAI AMANAT UUD 1945 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Hendri Hartono; Rido Sarwono

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

Cooperatives are one ideological concept of Indonesian economy and stated firmly in constitutional of Republik Indonesia. The growth of cooperatives in Indonesia has complex problems so they are pushed by capitalism power from private companies. Whereas, cooperatives were built as economical blocks in mediating Indonesian people to be more welfare economically. Data from Cooperatives Department, there are significant growth of cooperatives from 2006 to 2010: the active cooperatives are 98.944 up to 124.855. Meanwhile, the unactive cooperatives are 42.382 (2006) to 52.627 (2010, in total amount of 177.482 in 2010. The cooperatives growth is interesting to be research in the future to identify wealth of cooperatives and which area has the most rapid growing of cooperatives.

Keywords: cooperatives, economic, UUD 45

ABSTRACT

Koperasi merupakan sebuah konsepsi ideologi ekonomi Indonesia dan dinyatakan secara tegas dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Pertumbuhan koperasi di Indonesia memiliki masalah sedemikian kompleks hingga koperasi tergerus oleh kekuatan kapitalisme perusahaan swasta besar. Padahal koperasi telah dirancang sedemikian rupa sebagai sebuah benteng ekonomi yang dapat menjadi sebuah sarana untuk mengantarkan masyarakat Indonesia agar lebih sejahtera secara ekonomis. Dari data Departemen koperasi ternyata pertumbuhan koperasi sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 pertumbuhannya cukup signifikan, dari jumlah koperasi aktif sebanyak 98.944 naik jumlahnya menjadi 124.855. sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif juga jumlahnya cukup banyak, yaitu sebanyak 42.382 pada tahun 2006 dan berjumlah 52.627 pada tahun 2010 dengan total keseluruhan adalah 177.482 pada tahun 2010. Peningkatan pertumbuhan koperasi ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk melihat kekayaan yang dimilikinya dan pada daerah mana koperasi-koperasi ini berkembang pesat.

Kata kunci: koperasi, ekonomi, UUD 45

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai landasan pemikiran Ekonomi amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen pada pasal 33 ayat 1 dikatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan” asas kekeluargaan bukan dalam artian keluarga, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan adalah Koperasi. Meminjam kata dari Sri-Edi Swasono koperasi itu adalah ekonomi perjuangan, artinya perjuangan untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan, sehingga tercapai Negara Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Swasono, 1983).

Makna filosofis yang terkandung dalam pasal 33 secara holistik adalah peran Negara dalam menjamin segala apa yang terkandung pada bumi Indonesia harus dikuasai negara dan diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu proses ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi) yang menjadi pilihan para pendiri bangsa adalah jalan tengah (Mubyarto, 2006) dari ekonomi liberal dan sosialis dengan formulasi Koperasi sebagai sub-system dari kedua ekonomi besar. Koperasi menjadi sebuah pilihan yang netral dalam menjaga dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, menurut Bung Hatta, koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat yang terbelakang karena meningkatkan jalan antara produksi dan konsumsi (Hatta, 1978).

Konsep Demokrasi Ekonomi berasas kekeluargaan ini merupakan pemikiran yang sangat visioner, dikatakan bahwa koperasi sebagai sebuah badan usaha selain mencari keuntungan juga harus mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan melalui pendidikan dan pelatihan, pemikiran ini jauh lebih maju apabila kita sandingkan dengan konsep CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang lahir sejak tahun 1996 sejak adanya *class action* orang-orang Yahudi pada pengadilan negri Brooklyn, New York Amerika Serikat (Widjaja & Pratama, 2008) dengan menggugat perusahaan-perusahaan yang pada kejadian pembantaian (*holocaust*) oleh Hitler. Sejak diputuskan kasus tersebut barulah pemikiran tanggung jawab sosial perusahaan mulai diterapkan di Barat hingga akhirnya diterapkan di Indonesia pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertanyaan yang sekarang harus adalah bagaimana memformulasikan dan melakukan *spin off* menggunakan koperasi sebagai katalisator ekonomi dengan menanamkan karakter dan nilai-nilai *entrepreneurship* melalui kreativitas dan inovasi sehingga Koperasi dapat menjadi tulang punggung ekonomi bangsa Indonesia.

Pemerintah dengan program pemberdayaan Koperasi terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan dan menggairahkan ekonomi nasional. Berbagai program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai lembaga pemerintah yang bertugas memberdayakan koperasi yang dianggap sebagai suatu usaha yang berbasis kerakyatan dan merupakan salah satu pelaku ekonomi serta langsung berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tulisan ini disusun guna memberikan informasi tentang perkembangan, peranan dan pengaruh ekonomi kerakyatan yaitu koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai bahan pertimbangan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Dalam penulisan ini maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimanakah pertumbuhan koperasi di Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, apakah pertumbuhannya meningkat atau tidak; (2) apakah koperasi dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dari jumlah pertumbuhan koperasi tersebut; (3) dalam klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah dan besar jenis usaha yang mana yang potensi pertumbuhannya paling tinggi.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang potensi ekonomi kerakyatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia perkembangan, peranan dan kinerja koperasi periode 2006–2010, dalam rangka mendukung proses penyusunan kebijakan di bidang perkoperasian utamanya program pemberdayaan koperasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari tujuan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat menggugah berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan pemberdayaan koperasi pada berbagai tingkatan birokrasi, baik pusat maupun daerah sehingga terjalin sinkronisasi dan keberlanjutan penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Manfaat dari segi akademis adalah, untuk memberikan perspektif tentang koperasi yang ternyata memiliki kontribusi bagi perekonomian di Indonesia, dapat dijadikan sebagai studi awal ataupun sumber acuan bagi para peminat yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang koperasi, serta dapat menjadi sebuah kontribusi penulis khususnya dalam pengembangan koperasi. Selain itu, ada pula manfaat praktis, yaitu agar koperasi dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan teknik ataupun ilmu kewirausahaan, menjadi salah satu acuan bagi praktisi dalam mengembangkan perekonomian khususnya di bidang koperasi, mengetahui potensi dari koperasi sebagai salah satu contributor dalam bidang ekonomi kecil untuk selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih besar lagi, serta dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan dalam bidang koperasi.

Kerangka Konseptual tentang Koperasi

Sejak jaman kolonial, koperasi diperkenalkan kepada Negara-negara dunia ketiga, ini adalah satu cara, pemerintah Kolonial Belanda berusaha melakukan edukasi kepada petani pribumi dan kelas menengah dalam bentuk pendidikan ekonomikoperasi eropa. Tujuan lainnya adalah untuk mengelola rantai proses dari produsen hingga konsumen, dan untuk menyediakan lahan, bahan-bahan baku. Oleh karenanya koperasi di koloni-koloni, didirikan dengan keadaan yang sangat berbeda dengan yang ada di eropa, dan koperasi ini juga memenuhi fungsi-fungsi yang berbeda.

Walaupun koperasi merupakan ciptaan barat, para pemimpin baru dari negara-negara yang baru, dan merdeka, cukup sabar untuk tidak meninggalkan bentuk organisasi yang seperti ini, pada tahun sembilanbelas enampuluhan. Sebaliknya mereka menerima dan mengadopsi koperasi sebagai salah satu alat pemerintahan yang penting dalam rangka organisasi penduduk yang bercirikan pertanian, pengamanan persediaan bahan makanan (terutama untuk daerah perkotaan), dan ekspor pertanian. Namun hasilnya seringkali mengecewakan. Pertanyaannya adalah: kenapa administrator dan politisi nasional tidak begitu tertarik?

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Istilah Koperasi berasal dari bahasa asing kata “*co operation*”, *co* = bersama-sama dan *operation* yang berarti usaha, koperasi berarti adalah usaha bersama, pengertian koperasi berarti suatu kelompok memiliki kegiatan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagai contoh Koperasi Unit Desa, (KUD) artinya usaha bersama dilingkungan masyarakat dalam suatu wilayah desa.

Menurut Pancasila dan UUD 1945, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Berdasarkan konsep-konsep literasi, koperasi dapat diartikan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial, lebih jauh lagi koperasi dapat dijadikan soko guru perekonomian nasional, dapat memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat yang maju adil makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip Koperasi

Berdasarkan aturan dalam Pasal 5, keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, sistem pengelolaan koperasi Indonesia pada umumnya bersifat demokrasi. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil seimbang dengan besarnya tergantung jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa terbatas kepada modal yang disetorkan, setiap kegiatan bersifat kemandirian anggotanya.

Bentuk Koperasi ada 2 buah yaitu: (1) Koperasi Primer yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang; dan (2) Koperasi Sekunder yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi.

Berdasarkan survei, badan usaha yang paling menguntungkan saat ini adalah koperasi karena koperasi sangat mudah untuk didirikan, dibebaskan dari pungutan pajak, banyak dibantu oleh fasilitas pemerintah, yang lebih menguntungkan lagi adalah tidak diaudit oleh lembaga pengawas keuangan pemerintah secara ketat (seperti halnya lembaga keuangan perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya).

Anggaran Dasar Koperasi, berdasarkan akta pendiriannya memuat anggaran dasar, permohonan ijin pendirian diajukan kepada Pemerintah Pengesahan Akte Pendirian oleh Pemerintah. Status Badan Hukum (*recht persoon*) Koperasi diperoleh sejak Akte Pendirian mendapat pengesahan dari Pemerintah. Sejak surat Pengesahan terbit saat itulah Koperasi disebut sebagai "Subyek Hukum". Pengesahan tersebut sekaligus merupakan ijin usaha Koperasi (lihat PP No. 9/95 Psl 3 ayat (3)). Prinsip Kemudahan ini yang tidak ada dalam pendirian badan usaha lainnya.

Anggota Koperasi adalah pemilik dan juga sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, sepanjang tidak merugikan anggotanya Selanjutnya tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. Keanggotaan koperasi didasari oleh kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD), berdasarkan sifatnya keanggotaan koperasi tidak bisa dipindah tangankan. Hak dan kewajiban anggota adalah sama.

Adapun konsep koperasi dapat dijabarkan secara lebih lanjut sebagai berikut: (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan; (2) perkoperasian adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi; (3) Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha; (4) anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi serta tercatat dalam buku daftar anggota; (5) Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat anggota koperasi yang pelaksanaannya sesuai dengan AD/ART koperasi; (6) manajer adalah orang yang di angkat oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi; (7) karyawan adalah orang yang dipekerjakan koperasi baik dalam menangani organisasi maupun usaha dan mendapatkan gaji dari koperasi; (8) modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko (modal equity) atau merupakan kumulatif dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah; (9) Modal Luar adalah modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari: anggota, koperasi lainnya, bank/lembaga keuangan, penerbitan obligasi/surat berharga dan sumber-sumber lainnya; (10) Volume Usaha adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan; dan (11) Sisa hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang di peroleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku, yang bersangkutan.

METODE

Data-data yang diperoleh dan digunakan dalam analisa ini bersumber dari laporan Biro Pusat Statistik dan laporan dari Depkop tingkat propinsi di seluruh Indonesia sesuai dengan kondisi dan perkembangan perkoperasian di masing-masing daerah.

Dalam melakukan analisis dilakukan antara lain analisis: Rentabilitas Modal (R), yang merupakan suatu cara untuk mengetahui kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan laba yang dinyatakan dalam (%). Dalam hal ini, rentabilitas koperasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan modal sendiri koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Untuk menghitung Rentabilitas modal koperasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rentabilitas (R)} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Selain itu, dilakukan juga analisis Return On Asset (ROA) merupakan suatu cara untuk mengetahui kemampuan Asset koperasi untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam persen (%). Dalam hal ini, Return On Asset koperasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan asset koperasi dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Untuk menghitung Return On Asset (ROA) koperasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Asset}} \times 100 \%$$

Dilakukan juga analisis Asset Turn Over (ATO), yang merupakan suatu cara untuk mengetahui tingkat perputaran asset koperasi dalam 1 (satu) periode tahun buku. Nilai minimal yang diharapkan dalam perputaran asset koperasi adalah 1,5 kali. Untuk menghitung ATO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Asset Turn Over (ATO)} = \frac{\text{Volume Usaha}}{\text{Asset}} \times 1 \text{ Kali}$$

Ruang Lingkup

Ruang lingkup tulisan ini meliputi: (1) pertumbuhan Koperasi 2006-2010 dengan memperlihatkan keragaan koperasi menurut propinsi/daerah istimewa; (2) pertumbuhan Anggota Koperasi periode 2006-2010; (3) kinerja koperasi di Indonesia menurut propinsi/daerah istimewa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Koperasi 2006 – 2010

Jumlah koperasi di Indonesia periode 2006 -2010 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 141.326 unit pada tahun 2006 menjadi 177.482 unit pada tahun 2010. Menelusuri data yang diolah dari Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM) terdapat 42.383 unit koperasi tidak aktif pada tahun 2006 menjadi 52. 627 unit pada tahun 2010 atau terjadi peningkatan sebesar 10.245 unit (24,2%).

Tabel - 1						
Jumlah koperasi di Indonesia Tahun 2006 – 2010						
(dalam unit)						
No	Variabel	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Koperasi Aktif	98.944	104.999	108.930	120.473	124.855
2	Koperasi Tidak Aktif	42.382	44.794	46.034	49.938	52.627
3	Jumlah Koperasi	141.326	149.793	154.964	170.411	177.482

Sumber : Hasil Olahan Laporan Kementerian KUKM

Dengan mengacu pada data Tabel 1, pertumbuhan koperasi diduga sangat tergantung pada dinamika di masing-masing wilayah/propinsi di samping faktor-faktor lain seperti pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi di dalam mendorong ekonomi. Perkembangan jumlah anggota koperasi periode 2006-2010 mengalami peningkatan sebanyak 2.684.993 orang atau sebesar 9,66% yaitu dari 27.778.139 orang pada tahun 2006 menjadi 30.463.132 orang pada tahun 2010. Distribusi jumlah anggota koperasi terbesar terkonsentrasi di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta, sedangkan untuk daerah lain relatif seimbang (Lampiran 1). Secara rinci gambaran distribusi jumlah anggota koperasi terbesar pada 5 daerah tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel - 2						
Distribusi Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia Tahun 2006 – 2010						
(dalam orang)						
No	Propinsi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Jawa Barat	6.154.406	6.222.006	4.251.889	4.543.760	5.180.721
2	Jawa Timur	4.612.071	5.002.532	5.057.750	5.107.846	5.209.364
3	Jawa Tengah	4.252.760	4.387.110	4.576.355	4.702.174	4.531.293
4	Sulawesi Selatan	1.080.197	1.117.959	1.196.668	1.025.847	1.128.384
5	DKI Jakarta	1.068.682	971.040	979.860	982.723	1.153.010

Sumber : Hasil Olahan Laporan Kementerian KUKM

Pertumbuhan anggota koperasi tersebut di atas dapat memberikan gambaran bahwa suatu koperasi telah berjalan dan telah memberikan manfaat terhadap masyarakat dan masyarakat semakin percaya bahwa koperasi yang telah dijalankan bersifat terbuka kepada seluruh masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi mereka. Hasil analisa data yang telah diolah terlihat bahwa masyarakat semakin percaya terhadap koperasi dimana terlihat pertumbuhan modal sendiri yaitu berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela yang berhasil dihimpun dari para anggota koperasi semakin meningkat.

Tabel - 3						
Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan SHU koperasi Tahun 2006 - 2010						
(dalam Rp. Juta)						
No.	Variabel	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Modal Sendiri	16.790.861	20.231.699	22.560.380	28.348.728	30.102.014
2	Modal Luar	22.062.212	23.324.032	27.271.935	31.503.882	34.686.713
3	Volume Usaha	62.718.500	63.080.596	68.446.249	82.098.587	76.822.082
4	Sisa Hasil Usaha	3.216.818	3.470.459	3.964.819	5.303.814	5.622.164

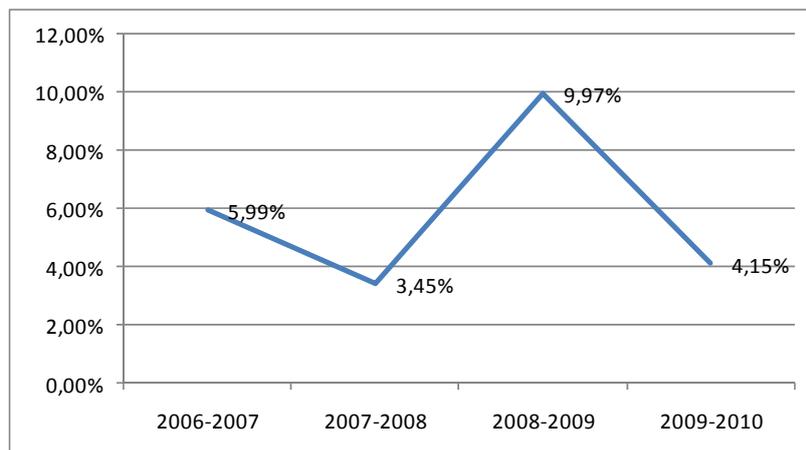
Sumber : Hasil Olahan Laporan Kementerian KUKM

Terlihat adanya peningkatan modal sendiri pada tahun 2006 sebesar Rp. 16.790.861 Juta menjadi Rp. 30.102.014 pada tahun 2010. Atau meningkat sebesar Rp. 13.311.153 Juta atau sebesar 79,27%. Anggota koperasi semakin merasakan manfaat ekonomis menjadi anggota koperasi dimana terlihat bahwa adanya peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dimana SHU ini akan dibagikan kepada anggota masyarakat setiap periode (umumnya setahun sekali). Pada periode 2006 -2010 dilaporkan bahwa tingkat partisipasi anggota mengalami peningkatan atau pertumbuhan sebesar 63,5 % atau meningkat sebesar Rp. 383.683 yaitu dari Rp. 604.463 pada tahun 2006 menjadi Rp. 988.146 pada tahun 2010.. Rasio jumlah anggota dan modal sendiri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel - 4						
Rasio Jumlah Anggota dan Modal Sendiri Tahun 2006 - 2010						
No.	Variabel	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Modal Sendiri (Rp. Juta)	16.790.861	20.231.699	22.560.380	28.348.728	30.102.014
2	Jumlah Anggota	27.778.139	28.890.074	27.320.627	29.242.280	30.463.132
3	Rasio (Rp.)	604.463	700.299	825.764	969.443	988.146

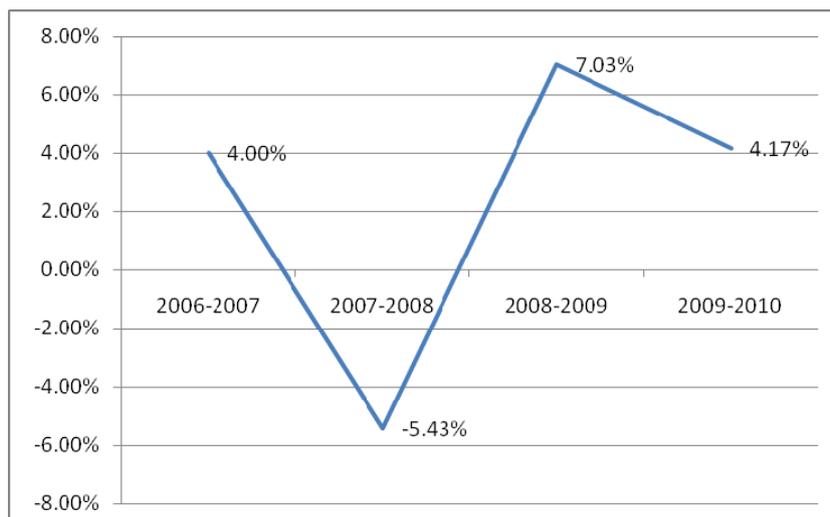
Sumber : Hasil Olahan Laporan Kementerian KUKM

Perkembangan jumlah koperasi periode 2006-2010 terjadi pada periode 2008-2009 yang mencapai 9,97%. Hal ini diduga disebabkan pada tahun tersebut berbagai upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat melalui koperasi.



Gambar 1 Tingkat pertumbuhan jumlah koperasi tahun 2006-2010

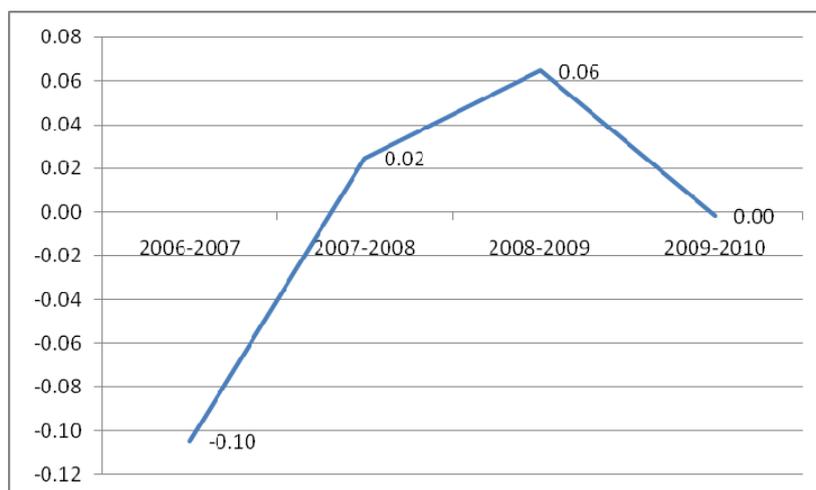
Perkembangan jumlah anggota koperasi periode 2006-2010 mengalami peningkatan sebesar 9,66%, dan pada kurun waktu tersebut, perkembangan jumlah anggota tertinggi terjadi pada periode 2008-2009 yaitu mencapai 7,03%. Penurunan jumlah anggota terjadi pada periode 2007-2008 yaitu mencapai 5,43%. Penurunan diduga terjadi akibat dampak krisis global yang melanda saat itu.



Gambar 2 Tingkat pertumbuhan anggota koperasi tahun 2006-2010

Kinerja Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usaha anggota yang diharapkan dapat memberikan manfaatnya kepada anggota dalam wujud peningkatan *bargaining position* sehingga usaha anggota memiliki keuntungan optimal dalam proses penjualan produknya. Produktivitas koperasi dilihat dari sisi rentabilitas modal koperasi dapat memberikan gambaran tentang berapa besar kemampuan modal koperasi dalam menghasilkan SHU. Secara nasional rentabilitas modal koperasi tertinggi tercatat pada periode 2008-2009 sebesar 0,06 yang selanjutnya mengalami penurunan pertumbuhan di periode 2009-2010.



Gambar 3 Tingkat pertumbuhan rentabilitas koperasi periode 2006-2010

Gambaran tentang pertumbuhan nilai rentabilitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

No.	Propinsi	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1	Jawa Barat	-0,15	-0,47	0,67	0,00
2	Jawa Timur	-0,30	-0,06	1,46	0,00
3	Jawa Tengah	0,02	-0,58	5,67	0,57
4	Sulawesi Selatan	0,16	0,19	1,33	-0,28
5	DKI Jakarta	0,02	-0,88	8,63	0,00

Secara rinci perkembangan rentabilitas koperasi per propinsi disajikan dalam lampiran 2. Return On Asset atau kemampuan asset yang dimiliki koperasi dalam menghasilkan laba (SHU), merupakan indikator dalam menghitung tingkat produktivitas koperasi. Propinsi dengan tingkat produktivitas tertinggi pada tahun 2008 berada di propinsi Kalimantan Timur yaitu mencapai 236,65%, sedangkan yang terkecil berada di propinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 1,09% pada tahun 2010. Secara rinci gambaran produktivitas koperasi per propinsi disajikan dalam lampiran-3.

		(dalam Rp. Juta)				
No.	Propinsi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
		ROA	ROA	ROA	ROA	ROA
1	Kalimantan Timur	121,64%	77,12%	236,65%	12,38%	12,31%
2	Maluku	27,32%	11,29%	16,22%	13,23%	10,67%
3	Sulawesi Tenggara	20,63%	18,43%	35,04%	17,24%	17,19%
4	DKI Jakarta	19,63%	21,40%	2,10%	19,39%	19,39%
5	Kepulauan Bangka	19,27%	17,55%	20,32%	20,34%	19,22%

Dengan menggunakan data yang sama, Asset Turn Over (ATO) koperasi dalam periode 2006–2010 terdapat 5 propinsi yang memiliki ATO yang tinggi yaitu Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Secara rinci gambaran produktivitas koperasi per propinsi disajikan dalam lampiran 4.

		(dalam Rp. Juta)				
No.	Propinsi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
		ATO	ATO	ATO	ATO	ATO
1	Kalimantan Timur	389,54%	247,63%	224,46%	216,84%	216,84%
2	DKI Jakarta	318,38%	320,80%	211,49%	222,15%	222,15%
3	Banten	258,23%	259,74%	168,06%	188,53%	188,53%
4	Jawa Timur	234,93%	149,86%	168,63%	163,56%	78,67%
5	Sulawesi Selatan	195,75%	142,87%	138,36%	96,19%	69,34%

Dengan gambaran tersebut menunjukkan bahwa kinerja koperasi masih terus harus ditingkatkan dalam upaya menopang perekonomian masing-masing daerah yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas perekonomian nasional.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan serta dengan memperhatikan hasil analisis terhadap data yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam penyebarannya, jumlah koperasi terbesar masih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki dinamika perekonomian yang relatif lebih baik seperti Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Hasil analisis terhadap data menunjukkan bahwa pengelolaan usaha koperasi masih memerlukan pembinaan lebih lanjut untuk terus digalakkan. Namun demikian disadari bahwa, keseluruhan hasil dari analisis yang dilakukan baik yang menyangkut Rentabilitas, Return On Asset dan Asset Turn Over masih belum sempurna karna dukungan data yang tersedia belum dapat mendukung keseluruhan proses analisis secara tajam.

Saran

Dengan mengacu pada kesimpulan yang ada, maka disarankan agar dalam kesempatan selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal, yaitu: (1) Dalam upaya mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas koperasi perlu dilakukannya sinergi antar koperasi dan universitas yang dapat memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja koperasi, baik produk dan jasa, maupun kinerja keuangan, serta tetap memperhatikan pemberdayaan anggota sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Seluruh unit operasional pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM diharapkan dapat memberikan rangsangan melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kelembagaan koperasi; (3) Dalam upaya mendukung proses pengumpulan dan pengolahan data agar lebih akurat dan kontinyu, perlu dilakukan suatu aturan yang diketahui dan disepakati oleh seluruh daerah (dinas/badan/instansi yang membidangi KUKM di daerah) dengan memberikan reward sebagai suatu insentif, sehingga dapat memberikan rangsangan bagi daerah-daerah yang dapat memberikan/mengirimkan data secara kontinyu dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, M. (1978). *Pengertian pancasila*. Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional-Jakarta, dengan Lampiran Sila Demi Sila, PT. Inti Idayu Press, Jakarta 1978.
- Mubyarto. (2006). *Ideologi sistem ekonomi, dan politik perekonomian*. Refleksi Pribadi Pertemuan II Tim Ahli Bidang Ekonomi PAH I BP-MPR, 28 Maret 2006, dalam Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta, 2006.
- Swasono, S. E. (1983). *Membangun koperasi sebagai soko-guru perekonomian Indonesia, dalam mencari bentuk, posisi dan realitas koperasi di dalam orde ekonomi Indonesia*. UI Press.
- Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). *Seri pemahaman perseoran terbatas, resiko hukum dan bisnis perusahaan tanpa CSR*. Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Lampiran 1

Distribusi Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia Tahun 2006 – 2010						
No	Propinsi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Jawa Barat	6.154.406	6.222.006	4.251.889	4.543.760	5.180.721
2	Jawa Timur	4.612.071	5.002.532	5.057.750	5.107.846	5.209.364
3	Jawa Tengah	4.252.760	4.387.110	4.576.355	4.702.174	4.531.293
4	Sulawesi Selatan	1.080.197	1.117.959	1.196.668	1.025.847	1.128.384
5	DKI Jakarta	1.068.682	971.040	979.860	982.723	1.153.010
6	Sumatera Utara	926.524	1.212.832	1.222.187	2.098.947	2.084.117
7	Lampung	875.500	730.420	631.332	676.497	676.507
8	Banten	871.544	872.203	926.059	945.145	998.778
9	Bali	755.004	788.774	849.781	859.628	886.439
10	Sumatera Selatan	718.996	726.984	746.920	766.700	763.426
11	D.I. Yogyakarta	605.186	610.550	639.533	666.760	782.982
12	Nusa Tenggara Barat	537.156	540.386	585.933	592.518	610.698
13	Sumatera Barat	536.058	560.845	540.418	560.521	560.332
14	Riau	515.037	583.092	578.355	577.183	571.602
15	Nanggroe Aceh Darussalam	460.537	485.254	494.564	505.412	528.953
16	Sulawesi Utara	451.567	508.780	488.319	491.967	494.564
17	Kalimantan Timur	379.269	386.594	405.260	795.610	795.610
18	Nusa Tenggara Timur	357.871	388.660	401.367	465.023	485.342
19	Kalimantan Barat	349.836	425.626	578.655	666.005	703.670
20	Kepulauan Riau	319.850	362.184	131.284	135.997	137.327
21	Jambi	318.536	319.956	291.025	341.421	352.477
22	Kalimantan Selatan	290.992	294.644	294.644	299.878	308.321
23	Sulawesi Tengah	233.445	237.531	243.650	226.301	224.358
24	Kalimantan Tengah	206.976	194.659	212.875	212.379	201.555
25	Sulawesi Tenggara	176.799	192.678	194.761	202.674	202.798
26	Papua	137.767	145.441	157.547	100.703	154.038
27	Bengkulu	129.988	131.947	144.394	140.483	158.506
28	Gorontalo	104.567	109.608	120.555	126.384	124.932
29	Maluku	82.975	107.524	115.237	142.477	151.384
30	Sulawesi Barat	77.675	67.970	72.322	79.639	85.447
31	Kepulauan Bangka Belitung	67.147	73.367	73.494	81.319	88.273
32	Papua Barat	65.743	69.883	52.513	52.677	53.338
33	Maluku Utara	55.472	59.028	63.113	67.673	72.576
	Total	27.778.139	28.890.074	27.320.627	29.242.280	30.463.132

Sumber : Hasil Olahan Laporan Kementerian KUKM

Lampiran 2

Tingkat Kemampuan Modal Sendiri untuk Menghasilkan Sisa Hasil Usaha Koperasi						
(dalam Rp. Juta)						
No.	Propinsi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
		Rentabilitas	Rentabilitas	Rentabilitas	Rentabilitas	Rentabilit
1	Jawa Barat	29,70%	25,20%	13,26%	22,10%	22,10%
2	Jawa Timur	10,12%	7,04%	6,63%	16,30%	16,27%
3	Jawa Tengah	4,80%	4,89%	2,07%	13,83%	21,66%
4	Sulawesi Selatan	10,76%	12,53%	14,84%	34,52%	24,73%
5	DKI Jakarta	36,84%	37,42%	4,68%	45,02%	45,02%
6	Sumatera Utara	32,12%	23,85%	8,38%	20,54%	18,13%
7	Lampung	24,09%	25,61%	29,43%	25,43%	16,83%
8	Banten	23,58%	23,82%	26,22%	32,30%	32,30%
9	Bali	11,97%	15,71%	20,98%	16,85%	16,13%
10	Sumatera Selatan	12,22%	11,71%	29,25%	11,84%	12,69%
11	D.I. Yogyakarta	11,49%	8,30%	10,29%	10,75%	18,22%
12	Nusa Tenggara Barat	12,00%	12,14%	8,94%	9,80%	9,66%
13	Sumatera Barat	11,09%	14,05%	43,40%	13,20%	13,86%
14	Riau	43,85%	19,67%	2,06%	24,52%	15,15%
15	Nanggroe Aceh	28,25%	64,49%	13,08%	14,62%	11,37%
16	Sulawesi Utara	6,28%	6,46%	5,29%	6,37%	1,84%
17	Kalimantan Timur	463,85%	245,02%	416,74%	32,31%	32,13%
18	Nusa Tenggara	8,95%	15,13%	45,43%	16,06%	4,92%
19	Kalimantan Barat	23,11%	48,59%	5,51%	7,81%	7,74%
20	Kepulauan Riau	21,12%	10,78%	131,41%	23,30%	15,94%
21	Jambi	17,45%	20,52%	42,07%	23,49%	17,31%
22	Kalimantan Selatan	15,59%	22,65%	132,92%	18,28%	17,64%
23	Sulawesi Tengah	8,71%	8,39%	7,87%	7,02%	6,81%
24	Kalimantan Tengah	17,40%	17,40%	75,98%	17,76%	9,70%
25	Sulawesi Tenggara	35,82%	35,34%	62,49%	29,64%	29,55%
26	Papua	22,30%	10,49%	21,12%	40,37%	13,97%
27	Bengkulu	9,63%	4,90%	1,32%	30,40%	27,77%
28	Gorontalo	64,57%	20,95%	25,79%	19,28%	20,41%
29	Maluku	36,67%	23,97%	32,86%	27,10%	19,59%
30	Sulawesi Barat	7,77%	21,83%	25,28%	22,76%	22,76%
31	Kepulauan Bangka	33,57%	28,12%	34,88%	42,24%	37,32%
32	Papua Barat	17,86%	17,37%	59,68%	30,26%	30,26%
33	Maluku Utara	26,73%	42,27%	8,16%	35,95%	17,13%
	TOTAL	19,16%	17,15%	17,57%	18,71%	18,68%

Sumber : Hasil Olahan Laporan Kementerian KUKM

Lampiran 3

Tingkat Produktivitas Koperasi Menurut Return on Asset (ROA)						
(dalam Rp. Juta)						
No.	Propinsi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
		ROA	ROA	ROA	ROA	ROA
1	Kalimantan Timur	121,64%	77,12%	236,65%	12,38%	12,31%
2	Maluku	27,32%	11,29%	16,22%	13,23%	10,67%
3	Sulawesi Tenggara	20,63%	18,43%	35,04%	17,24%	17,19%
4	DKI Jakarta	19,63%	21,40%	2,10%	19,39%	19,39%
5	Kepulauan Bangka	19,27%	17,55%	20,32%	20,34%	19,22%
6	Gorontalo	19,16%	6,37%	7,76%	6,11%	6,52%
7	Riau	14,04%	6,61%	0,65%	7,41%	5,15%
8	Sumatera Utara	13,66%	10,44%	3,67%	9,54%	10,10%
9	Kepulauan Riau	13,47%	6,90%	68,37%	15,83%	10,85%
10	Jawa Barat	13,44%	12,44%	5,95%	11,25%	11,25%
11	Nanggroe Aceh	12,25%	26,24%	5,85%	7,54%	5,14%
12	Kalimantan Tengah	11,92%	9,33%	41,26%	9,01%	7,95%
13	Papua Barat	11,74%	10,25%	12,28%	6,23%	6,23%
14	Papua	11,58%	7,69%	12,61%	23,82%	10,71%
15	Banten	10,74%	10,85%	9,08%	13,63%	13,63%
16	Maluku Utara	10,42%	16,80%	4,36%	18,83%	8,90%
17	Kalimantan Barat	7,53%	19,16%	1,41%	3,51%	3,50%
18	Sumatera Barat	6,70%	7,73%	28,10%	7,80%	6,59%
19	Sulawesi Selatan	6,23%	7,58%	8,66%	18,51%	12,90%
20	Bengkulu	5,94%	3,94%	1,15%	17,17%	13,95%
21	Lampung	5,72%	6,01%	7,19%	5,95%	5,30%
22	Kalimantan Selatan	5,33%	7,85%	46,19%	6,87%	8,42%
23	Nusa Tenggara	5,32%	5,27%	4,05%	3,89%	3,77%
24	Sulawesi Barat	5,09%	12,66%	16,16%	12,81%	12,81%
25	Jambi	4,81%	11,97%	26,06%	9,10%	8,91%
26	Sulawesi Tengah	4,61%	4,39%	3,86%	3,60%	4,14%
27	Nusa Tenggara	4,50%	8,01%	23,84%	8,12%	1,89%
28	D.I. Yogyakarta	4,28%	4,10%	4,78%	4,88%	9,00%
29	Jawa Timur	4,25%	3,18%	3,14%	7,90%	7,81%
30	Sumatera Selatan	4,07%	4,72%	17,44%	6,80%	6,77%
31	Bali	3,70%	4,50%	6,38%	6,38%	6,41%
32	Jawa Tengah	2,28%	2,53%	0,91%	6,86%	9,07%
33	Sulawesi Utara	2,18%	2,50%	2,23%	3,24%	1,09%

Lampiran 4

Tingkat Produktivitas Koperasi Menurut Asset Turn Over (ATO)

(dalam Rp. Juta)

No.	Propinsi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
		ATO	ATO	ATO	ATO	ATO
1	Kalimantan Timur	389.54%	247.63%	224.46%	216.84%	216.84%
2	DKI Jakarta	318.38%	320.80%	211.49%	222.15%	222.15%
3	Banten	258.23%	259.74%	168.06%	188.53%	188.53%
4	Jawa Timur	234.93%	149.86%	168.63%	163.56%	78.67%
5	Sulawesi Selatan	195.75%	142.87%	138.36%	96.19%	69.34%
6	Papua Barat	185.64%	137.01%	47.24%	47.24%	47.24%
7	Maluku	179.79%	136.35%	95.26%	118.63%	82.48%
8	Kepulauan Bangka	175.51%	140.54%	297.36%	398.12%	420.83%
9	Nanggroe Aceh	167.83%	132.50%	166.74%	101.67%	92.35%
10	Sulawesi Barat	162.03%	135.29%	120.02%	117.28%	117.28%
11	Jawa Tengah	161.56%	176.03%	134.35%	114.79%	111.65%
12	D.I. Yogyakarta	156.86%	201.15%	197.53%	195.17%	322.39%
13	Kepulauan Riau	150.00%	60.21%	103.51%	115.03%	68.31%
14	Riau	147.46%	121.21%	135.94%	116.42%	101.68%
15	Sulawesi Tenggara	145.18%	142.31%	147.66%	126.50%	126.27%
16	Nusa Tenggara Barat	144.07%	145.44%	114.68%	110.79%	129.66%
17	Bali	143.63%	131.79%	143.81%	128.15%	169.56%
18	Maluku Utara	142.81%	168.35%	117.82%	166.64%	107.74%
19	Lampung	134.76%	120.45%	120.26%	116.84%	98.88%
20	Papua	128.78%	374.16%	486.30%	475.59%	89.98%
21	Jambi	124.17%	217.50%	170.63%	207.04%	204.97%
22	Jawa Barat	120.84%	111.80%	119.10%	120.24%	120.24%
23	Kalimantan Barat	117.63%	190.26%	60.09%	97.35%	110.29%
24	Kalimantan Tengah	112.05%	136.66%	121.27%	106.80%	100.67%
25	Sumatera Selatan	106.32%	100.68%	152.12%	153.74%	153.94%
26	Gorontalo	92.23%	101.64%	105.94%	88.50%	96.85%
27	Sumatera Barat	90.41%	122.89%	84.12%	109.93%	139.79%
28	Kalimantan Selatan	85.07%	120.03%	80.79%	131.29%	82.85%
29	Bengkulu	79.66%	111.74%	65.92%	121.25%	262.41%
30	Sulawesi Utara	66.44%	46.68%	36.09%	122.17%	76.01%
31	Sumatera Utara	65.79%	109.06%	119.31%	128.50%	133.00%
32	Sulawesi Tengah	55.53%	55.79%	54.45%	62.99%	61.27%
33	Nusa Tenggara Timur	42.75%	61.80%	93.48%	79.62%	34.84%